

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN SKEMA	xxii
HALAMAN TABEL	xxiii
GLOSSARY	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian	23
1. Kegunaan Secara Teoritis	23
2. Kegunaan Secara Praktis	24
E. Kerangka Konseptual	24
F. Kerangka Teori	36
1. Teori Keadilan Pancasila (<i>Grand Theory</i>).....	36
2. Teori Kedaulatan Rakyat (<i>Middle Theory</i>)	40
3. Teori Hukum Progresif (<i>Applied Theory</i>)	47
G. Kerangka Pemikiran	49
H. Metode Penelitian	53
1. Paradigma Penelitian	54

2. Sifat Penelitian	56
3. Pendekatan Penelitian	58
4. Sumber Data	60
5. Teknik Pengumpulan Data	62
6. Analisis Data.....	65
I. Sistematika Penulisan	68
J. Orisinalitas/Kebaruan Penelitian	69
BAB II KAJIAN PUSTAKA	72
A. Kajian Teoritis tentang Kedaulatan	72
1. Istilah dan Pengertian Kedaulatan	72
2. Hakikat Kedaulatan	75
3. Perkembangan teori kedaulatan	77
4. Macam-macam kedaulatan	79
a. Kedaulatan Tuhan	79
b. Kedaulatan Raja	85
c. Kedaulatan Negara.....	88
d. Kedaulatan Hukum.....	90
e. Kedaulatan Rakyat.....	92
5. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	99
6. Kedaulatan Hukum.....	100
B. Bentuk-bentuk Demokrasi	101
1. Pengertian Demokrasi	101
2. Demokrasi Konstitusional	103
3. Demokrasi yang Bersandar atas Paham Komunisme	104
4. Demokrasi Nasional	106
5. Demokrasi Pancasila	107
C. Sistem Pemilu di Indonesia	108
1. Pengertian sistem pemilihan umum	110
2. Urgensi sistem pemilihan umum.....	111

3. Sistem pemilu proposional.....	112
4. Sistem pemilihan distrik.....	113
5. Sistem pemilu indonesia.....	114
a. Sistem pemilihan umum DPR dan DPRD.....	115
b. Sistem pemilihan umum anggota DPD.....	117
c. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.....	118
d. Sistem pemilihan kepala daerah.....	119
D. Pemilu dalam Konsep Islam	121
E. Sistem Pemilu Menurut UUD NRI Tahun 1945	130
1. Komisi pemilihan umum (KPU).....	137
2. Pengusulan dan penetapan bakal calon Presiden dan wakil Presiden.....	147
 BAB III AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PEMILU DPR RI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 YANG BELUM BERKEADILAN	
	151
A. Landasan Pemilihan Umum.....	151
B. Pelaksanaan Pemilu Era Orde Lama.....	165
C. Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru	169
D. Pelaksanaan Pemilu Era Transisi Reformasi (1999).....	173
E. Pelaksanaan Pemilu Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.	175
1. Pemilu legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota) tahun 2004.....	178
2. Pemilu legislatif anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2009.....	186
3. Pemilu legislatif tahun 2004.....	197
4. Pemilu legislatif tahun 2009.....	208
F. Pengaturan ambang batas peroleh suara pemilu legislatif (DPR) saat ini.....	223

BAB IV PROBLEMATIKA AMBANG BATAS PEROLEHAN	
SUARA PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF (DPR) PASCA	
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN	
1945 SAAT INI	
	226
A. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	226
B. Problematika Substansi Hukum Pemilu Pasca Amandemen	
UUD Tahun 1945	230
C. Problematika Struktur Hukum Pemilu Pasca Amandemen	
UUD Tahun 1945	240
1. Pemilihan umum.....	241
a. Sistem pemilihan umum di Indonesia.....	241
b. Pengertian pemilihan umum.....	242
2. Kelebihan Undang-Undang pemilu No 7 Tahun 2017.....	249
3. Kelemahan undang-undang pemilu No 7 Tahun 20017.....	252
D. Problematika Budaya Hukum Pemilu Pasca Amandemen	
UUD Tahun 1945.....	257
E. Problematika Sistem Pemilu DPR, dan DPRD Pasca	
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik	
Indonesia Tahun 1945 Terhadap Kedaulatan Rakyat	263
 BAB V REKONSTRUKSI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA	
PEMILU LEGISLATIF (DPR) BERBASIS NILAI	
KEADILAN PANCASILA.....	
	280
A. Pelaksanaan pemilu di beberapa negara.....	280
1. Pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat	280
2. Pelaksanaan Pemilu di Perancis	288
3. Pelaksanaan Pemilu di Vietnam.....	298
B. Rekonstruksi Pasal Ambang Batas Perolehan Suara Pemilu	
Legislatif Berbasis Keadilan Pancasila	302

BAB VI PENUTUP.....	313
A. Simpulan	313
B. Implikasi Hasil Penelitian Disertasi	314
C. Saran	315
DAFTAR PUSTAKA	317

HALAMAN SKEMA

1. Kerangka Pemikiran	49
2. Kerangka Pemikiran	50
3. Kerangka Pemikiran	51

HALAMAN TABEL

1. Tabel I-1. Penelitian terdahulu	68
2. Tabel IV-1 Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004	269
3. Tabel IV-2 Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009	272
4. Tabel IV-3 Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014	276
5. Tabel V-1. Hasil Rekonstruksi	311

GLOSSARY

Constitutional democracy : adalah demokrasi yang berdasarkan pada konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Closed list : sistem Pemilu dengan menggunakan daftar calon tertutup.

Democracy : kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Direct democracy : penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung melalui Pemilu.

Electoral system : sistem Pemilu yaitu instrument untuk menterjemahkan perolehan suara di dalam Pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.

Electoral proses : proses Pemilu terkait dengan pilihan teknis Pemilu.

Equality before the law : persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum, tidak ada perbedaan terhadap setiap warga negara.

Macht staat : negara berdasarkan atas kekuasaan.

Openend list : Pemilu dengan system varian daftar calon terbuka.

Plurality/majority system : sistem Pemilu dalam menentukan perolehan kursi dengan menggunakan suara terbanyak.

Proportional representation system : penentuan jumlah kursi pada daerah pemilihan didasarkan pada jumlah penduduk di satu daerah.

Procedural democracy : prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung itu hendaknya dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prosedur demokrasi.

Rechts staat : Negara berdasarkan atas hukum.

Supremacy of law : adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi.

In Abstrakto : Berlaku umum. Hukum *in abstrakto* : hukum berlaku umum

In Concreto : Hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

Ius Constitutum : adalah hukum yang berlaku.

Ius Constituendum : adalah hukum yang dikehendali dimasa mendatang.

Keadilan yang *ngewongke wong* : Keadilan yang memanusiakan manusia.

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu.
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilih.
Dapil	: Daerah Pemilihan.
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Golkar	: Golongan Karya.
KPU	: Komisi Pemilihan Umum.
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu.
Pemilu	: Pemilihan Umum.
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia.
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan.
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan.
PPS	: Panitia Pemungutan Suara.
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri.
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
UU	: Undang-Undang.